

Politik dan Kebijakan Afirmatif Terhadap Lulusan Ma'had Aly Menjadi Penyuluh Agama Islam

¹*Finan Ahsani Taqwim, ²Muhamad Iqbal Wibisono, ³Faishal Ackmal Survanta, ⁴Sabarudin

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

⁴Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

¹*finan.ahsani@gmail.com, ²muhamad171001@gmail.com, ³Survantafaishal@gmail.com ⁴sabarudin@uin-suka.ac.id

Tanggal Submit: 11-11-2025 Tanggal diterima: 12-12-2025 Tanggal Terbit: 17-12-2025

Abstrak: Penyerapan lulusan perguruan tinggi, termasuk Ma'had Aly, menjadi isu penting di tengah meningkatnya PHK dan persaingan kerja. Penelitian ini mengkaji rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan peluang kerja lulusan Ma'had Aly melalui studi literatur dan wawancara dengan pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian Agama. Kementerian Agama melalui Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 menargetkan agar lulusan perguruan tinggi keagamaan Islam dan Ma'had Aly memperoleh pekerjaan dalam waktu kurang dari satu tahun setelah kelulusan. Untuk mencapai target ini, diperlukan kebijakan terintegrasi antar-direktorat jenderal. Analisis kondisi faktual yang didukung dengan literatur ilmiah telah menghasilkan alternatif kebijakan berupa kebijakan afirmatif kepada lulusan ma'had aly yang dimulai dengan penguatan koordinasi antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) yang mengelola perguruan tinggi keagamaan dan Ma'had Aly, serta Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) yang mengatur penyuluh agama Islam. Tingginya kebutuhan akan tenaga penyuluh yang kompeten menuntut adanya kebijakan afirmatif bagi lulusan Ma'had Aly agar mereka menjadi penyuluh agama profesional. Kebijakan ini bersifat strategis karena memberikan manfaat timbal balik: Ditjen Bimas Islam memperoleh penyuluh berkualitas, Ditjen Pendis meningkatkan reputasi Ma'had Aly, dan Kementerian Agama secara keseluruhan diuntungkan melalui tercapainya target strategis "lulusan satu tahun langsung kerja".

Kata kunci: kebijakan afirmatif, kementerian agama, lulusan ma'had aly, penyerapan tenaga kerja

Abstract: The employment of higher education graduates, including those from Ma'had Aly, has become a critical issue amid rising layoffs (PHK) and job market competition. This study examines policy recommendations to enhance job opportunities for Ma'had Aly graduates through literature reviews and interviews with stakeholders in the Ministry of Religious Affairs. The Ministry targets, via its Strategic Plan (Renstra) 2025–2029, for graduates of Islamic religious higher education institutions and Ma'had Aly to secure employment within less than one year post-graduation. Achieving this requires integrated policies across directorate generals. A key strategy involves strengthening coordination between the Directorate General of Islamic Education (Ditjen Pendis), which manages religious higher education and Ma'had Aly, and the Directorate General of Islamic Community Guidance (Ditjen Bimas Islam), which oversees Islamic religious instructors. The high demand for competent religious instructors necessitates affirmative policies for Ma'had Aly graduates to become professional instructors. This policy is strategic, offering mutual benefits: Ditjen Bimas Islam gains qualified instructors, Ditjen Pendis boosts Ma'had Aly's reputation, and the Ministry overall achieves the "graduates employed within one year" strategic target.

Keywords: affirmative policy, labor absorption, ma'had aly graduates, ministry of religious affairs

PENDAHULUAN

Pendidikan keagamaan Islam di Indonesia telah lama berkembang melalui institusi pesantren, salah satunya berupa Ma'had Aly sebagai perguruan tinggi keagamaan berbasis pesantren yang menyelenggarakan program setara S1 hingga S3 (Marhalah Ula, Wustho dan Ulya) dengan legitimasi ijazah formal dari Kementerian Agama ¹. Lulusan Ma'had Aly kini berhak atas gelar akademik resmi, setara dengan perguruan tinggi umum, sehingga membuka peluang melanjutkan studi atau memasuki dunia kerja formal, termasuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil ². Namun, dalam konteks sosial-ekonomi terkini terdapat fakta pemutusan hubungan kerja (PHK) massal melebihi 126 ribu pekerja hingga oktober 2025 di berbagai sektor, mulai dari media massa hingga perusahaan manufaktur seperti Sritex dan Yamaha ³. Hal ini mendorong isu daya saing lulusan Ma'had Aly menjadi krusial.

Kementerian Agama sebagai instansi yang menaungi seluruh ma'had aly tidak tinggal diam. Draft Rencana Strategis (Renstra) Kemenag 2025–2029 menetapkan target ambisius agar lulusan perguruan tinggi keagamaan Islam dan Ma'had Aly memperoleh pekerjaan dalam waktu kurang dari satu tahun pasca kelulusan ⁴, menuntut lulusan tidak hanya unggul dalam keilmuan agama dan amaliah berbasis kitab kuning, tetapi juga kompetitif di pasar kerja formal. Kebijakan ini menegaskan peran Ma'had Aly dalam mencetak ulama berkualitas yang mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi modern. Meskipun demikian, literatur akademik yang membahas penyerapan tenaga kerja lulusan Ma'had Aly masih terbatas, dengan fokus utama pada aspek historis, kurikulum, dan legalitas, bukan pada adaptasi kerja atau daya saing.

Beberapa penelitian seperti disertasi di UIN Jember menganalisis strategi manajemen pengembangan kompetensi lulusan Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, yang menekankan kolaborasi internal (pengasuh pesantren dan manajemen) dengan eksternal (jaringan alumni, komunitas pesantren) ⁵. Namun, studi tersebut terbatas pada satu institusi dan belum mengkaji

¹ Yusmei and Iswantir, "Kontribusi Ma'had Aly Terhadap Pemahaman Keislaman Melalui Pendidikan Agama Islam Di Indonesia."

² Kementerian Agama and Madyansyah, "Lulusan Ma'had Aly Berpeluang Ikut Seleksi CPNS."

³ Setiawan, "Serikat Buruh Ungkap 126.160 Pekerja Kena PHK per Oktober 2025"; Trikarinaputri, Florentin, and Revanda, "Rangkaian Gelombang PHK Sejak Awal 2025: Media Massa Hingga Sektor Manufaktur."

⁴ Sapruddin, "Rencana Strategis Kementerian Agama 2025 2029."

⁵ Wahyono, "Strategi Manajemen Pengembangan Kompetensi Daya Saing Lulusan Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo."

kebijakan nasional secara komprehensif, termasuk diversitas lulusan Ma'had Aly atau koordinasi eksternal yang lebih luas seperti antar-direktorat jenderal Kemenag seperti Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam).

Penelitian ini dirumuskan melalui pertanyaan sentral: "Kebijakan seperti apa yang perlu diambil Kemenag, khususnya koordinasi Ditjen Pendis dan Ditjen Bimas Islam, untuk meningkatkan daya saing lulusan Ma'had Aly sehingga mencapai target kerja kurang dari satu tahun sesuai Renstra 2025–2029?" Pertanyaan ini mencakup kondisi pasar kerja, persepsi stakeholder, kompetensi profesional, dan mekanisme koordinasi lembaga. Tujuan utamanya adalah menyusun rekomendasi kebijakan strategis, seperti kemudahan rekrutmen afirmatif, penguatan kurikulum kompetensi, serta pembangunan jaringan alumni, untuk mendukung penyerapan lulusan di sektor penyuluhan agama maupun bidang relevan lainnya.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada literatur pendidikan tinggi pesantren, transisi lulusan ke dunia kerja, serta relevansi pendidikan Islam modern. Secara praktis, rekomendasi dapat menjadi dasar advokasi bagi analisis kebijakan Kemenag, program pengembangan lulusan, alumni tracking, dan strategi terintegrasi guna menjembatani regulasi formal dengan realitas sosial-ekonomi. Dengan demikian, riset ini memperkuat peran Ma'had Aly sebagai pilar pendidikan keagamaan yang adaptif dan kompetitif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik kualitatif dengan tujuan mendalami dinamika kebijakan dan koordinasi antarunit di Kementerian Agama dalam meningkatkan daya saing lulusan Ma'had Aly. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memahami secara komprehensif konteks sosial, kebijakan institusional, serta persepsi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pegawai Ditjen Pendis dan Kemenag secara umum. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan resmi seperti Renstra Kemenag 2025–2029, berita kredibel, dan publikasi akademik terkait pendidikan tinggi keagamaan Islam.

Analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan pendekatan analisis isi tematik. Data wawancara dan dokumen dikode untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait strategi

peningkatan kompetensi, mekanisme koordinasi antar-direktorat, dan faktor daya saing lulusan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen kebijakan dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil akhir analisis disajikan dalam bentuk sintesis kebijakan yang menawarkan rekomendasi strategis berbasis bukti empiris untuk mendukung pencapaian target penyerapan kerja lulusan Ma'had Aly sesuai arah kebijakan Kementerian Agama.

HASIL dan PEMBAHASAN

Isu terkait pekerjaan sering dianggap sebagai aspek krusial dalam evaluasi mutu lulusan perguruan tinggi. Saat ini, lulusan perguruan tinggi menghadapi tantangan besar terkait kesiapan kerja akibat ketatnya persaingan di pasar tenaga kerja, di mana sebanyak 74,5% mahasiswa tingkat akhir melaporkan ketidaksiapan untuk memasuki dunia kerja. Berbagai studi menekankan pentingnya pengembangan keterampilan lunak (soft skills), kreativitas, dan kemampuan beradaptasi sebagai faktor kunci dalam mempercepat proses penyerapan lulusan ke dalam dunia kerja. Selain itu, masalah ketenagakerjaan ini menjadi tolok ukur utama keberhasilan perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang kompetitif. Penelitian lain juga menyoroti perlunya penyesuaian kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan pasar kerja guna meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan dunia profesional ⁶.

Sebagai regulator utama pendidikan Islam, Kementerian Agama menjalankan peran strategis melalui kebijakan yang meliputi regulasi, pendanaan, kurikulum, serta pembinaan lembaga pendidikan seperti madrasah dan pesantren ⁷. Kemenag berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan standar nasional guna mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Pengelolaan yang terstruktur ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan sekaligus memastikan lembaga-lembaga tersebut dapat beradaptasi dan selaras dengan visi nasional serta tuntutan perkembangan masyarakat modern.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Agama memberikan persetujuan pendirian Ma'had Aly sebagai perguruan tinggi berbasis pesantren melalui

⁶ Kadiyono and Sulistiobudi, "Peningkatan Graduate Employability Melalui Career Development Training Pada Mahasiswa"; Pramesti, Meisya, and Amrillah, "Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi Dengan Dunia Kerja."

⁷ Wahyuni, R, and Aprianto, "Implementasi Strategi Dan Kebijakan Pendidikan Islam."

Peraturan Menteri Agama, yang memfasilitasi modernisasi pendidikan dengan mengintegrasikan kurikulum kitab kuning dan ilmu pengetahuan umum setara jenjang S1 hingga S3. Proses persetujuan ini memenuhi persyaratan kepemilikan pesantren serta standar nasional, sehingga mendukung aspirasi pesantren untuk berkembang menjadi lembaga formal tanpa kehilangan identitas tradisionalnya⁸. Kebijakan ini pada akhirnya memperkuat posisi pesantren sebagai pusat pendidikan tinggi Islam yang adaptif dan kompetitif. Saat ini terdapat 91 Ma'had Aly di Indonesia sudah berizin resmi dari Kementerian Agama⁹.

Kementerian Agama mendorong perkembangan Ma'had Aly dengan memasukkannya ke dalam Renstra Kemenag 2025-2029 sebagai salah satu sasaran strategis. Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai cetak biru organisasi yang memuat visi, misi, tujuan, serta program strategis untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien¹⁰. Renstra mendukung manajemen strategis Kemenag dalam menghadapi dinamika birokrasi, dengan penekanan pada adaptasi kinerja dan pencapaian target jangka panjang, sehingga memastikan kebijakan organisasi berjalan secara kompetitif

Renstra Kemenag 2025-2029 menetapkan target ambisius agar lulusan Ma'had Aly memperoleh pekerjaan dalam waktu kurang dari satu tahun pasca kelulusan, sehingga memerlukan dukungan kebijakan dan program strategis yang relevan untuk realisasinya. Sebagai dokumen perencanaan resmi yang berlaku hingga 2029, Renstra menuntut strategi implementasi yang terukur guna mencapai sasaran tersebut dalam sisa waktu yang tersedia. Pendekatan ini menekankan urgensi koordinasi antarunit dan alokasi sumber daya yang tepat sasaran

Salah satu peluang kerja yang melimpah bagi lulusan program studi agama Islam, termasuk dari Ma'had Aly, adalah posisi penyuluh agama Islam di bawah naungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag. Kebutuhan tenaga penyuluh yang terus meningkat menjadikan bidang ini sebagai jalur penyerapan kerja utama yang selaras dengan kompetensi kitab kuning dan keilmuan Islam tradisional.

⁸ Maskuri, "Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ma'Had Aly: Antara Harapan Dan Dilema."

⁹ Kementerian Agama, "Enam Ma'had Aly Terima Ijop, Total 91 Lembaga Sudah Kantongi Izin."

¹⁰ Kurnia, "Telaah Proses Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dalam Perspektif Manajemen Strategis (Penelitian Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya)."

Untuk mengakomodasi kebutuhan pegawai, Kemenag menerbitkan PMA No. 11 Tahun 2025 sebagai pedoman nasional perhitungan jabatan fungsional penyuluh agama Islam berdasarkan beban kerja, kondisi umat, dan karakteristik wilayah, dengan target pemenuhan hingga 71 ribu formasi. Saat ini, jumlah penyuluh masih jauh di bawah kebutuhan ideal (sekitar 28 ribu penyuluh), sehingga regulasi ini mendukung reformasi birokrasi guna menyediakan layanan penyuluhan yang proporsional dan efektif di seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad menekankan bahwa perhitungan lima tahunan ini bertujuan mengurangi ketimpangan antarwilayah ¹¹.

Saat ini, kebutuhan penyuluh agama Islam mencapai sekitar 43 ribu formasi, sementara data Satu Data Kemenag tahun ajaran 2022/2023 mencatat total 15.463 mahasantri Ma'had Aly di seluruh Indonesia, terdiri dari 12.627 laki-laki dan 2.836 perempuan, dengan dominasi Jawa Timur (7.821), Jawa Tengah (3.443), serta Jawa Barat (1.387) ¹². Meskipun terjadi penambahan jumlah lembaga Ma'had Aly menjadi 91 hingga Maret 2025, jumlah mahasantri diperkirakan masih jauh di bawah kebutuhan penyuluh nasional.

Sebagaimana diketahui, tidak seluruh lulusan mahasantri memiliki keinginan untuk menjadi penyuluh agama. Sebagian di antara mereka mungkin berasal dari pesantren lain atau merupakan putra kiai dari daerah tertentu yang berkeinginan untuk kembali dan mengabdikan di lingkungan asalnya. Oleh karena itu, kebijakan yang diusulkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tidak dimaksudkan sebagai kewajiban bagi lulusan Ma'had Aly untuk menjadi penyuluh agama, melainkan sebagai bentuk afirmasi atau pemberian nilai tambah dalam proses seleksi calon penyuluh. Sebagai contoh, apabila dua calon memiliki hasil ujian tulis dan wawancara yang relatif setara, namun salah satunya merupakan lulusan Ma'had Aly dan yang lain lulusan perguruan tinggi umum, maka lulusan Ma'had Aly dapat diberikan prioritas dalam penetapan hasil seleksi.

Praktik tersebut dikenal sebagai bentuk kebijakan afirmatif atau tindakan afirmatif. Kebijakan afirmatif merupakan langkah sementara yang diambil oleh negara untuk memberikan perlakuan khusus berupa nilai tambah atau prioritas kepada

¹¹ Firmansyah, "Kemenag Usulkan 71 Ribu Formasi Penyuluh Agama Islam Ke Kemenpan RB"; Kementerian Agama, "Kemenag Terbitkan PMA 11/2025, Jadi Pedoman Hitung Kebutuhan Penyuluh Agama."

¹² Satu Data Kementerian Agama, "Jumlah Santri Ma Had Aly Menurut Jenis Kelamin."

kelompok masyarakat yang secara historis mengalami marginalisasi¹³. Contohnya adalah lulusan pesantren yang sebelumnya sering dipandang kurang kompetitif dalam proses seleksi aparatur sipil negara (CPNS/PPPK). Melalui kebijakan ini, mereka memperoleh kesempatan yang lebih setara untuk berpartisipasi. Pada tahun 2024, lulusan Ma'had Aly untuk pertama kalinya memperoleh akses untuk mengikuti seleksi CASN, menandai langkah penting menuju inklusivitas. Dalam konteks ini, pemberian nilai tambah bukan merupakan kewajiban absolut, melainkan bentuk diskriminasi positif yang bertujuan mempercepat keterwakilan kelompok terpinggirkan seperti santri, serupa dengan penerapan kuota afirmatif bagi perempuan atau daerah tertinggal.

Kebijakan afirmatif ini tidak hanya berlandaskan pada fakta historis, tetapi juga diperkuat oleh berbagai hasil penelitian yang menegaskan kualitas unggul lulusan Ma'had Aly dalam bidang keilmuan Islam. Lembaga ini secara konsisten melahirkan mutafaqqih fiddin (ahli ilmu agama Islam) yang memiliki kedalaman pengetahuan dalam fiqh, ushul fiqh, serta disiplin keagamaan lainnya. Melalui sistem pendidikan berbasis kitab kuning, Ma'had Aly menempati posisi setara dengan perguruan tinggi Islam lainnya dalam menghasilkan lulusan berkompetensi akademik dan moral yang tinggi. Prestasi nasional para mahasiswa dalam bidang hafalan Al-Qur'an, penulisan esai, dan tahfiz menjadi bukti konkret atas kualitas ilmiah dan integritas amaliah para lulusannya. Dengan demikian, Ma'had Aly berperan penting dalam melahirkan generasi ulama unggul yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat akan sumber daya keagamaan yang otoritatif¹⁴.

Secara umum, terdapat tiga kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh agama, yaitu kompetensi dalam ilmu keagamaan, ilmu komunikasi, dan kompetensi sosial¹⁵. Lulusan Ma'had Aly dipersiapkan secara intensif melalui kurikulum yang menekankan penguasaan mendalam terhadap ilmu-ilmu keislaman. Kualitas keilmuan mereka dalam membaca dan memahami kitab gundul bahkan kerap dijadikan tolok ukur keunggulan dibandingkan lulusan perguruan tinggi keagamaan

¹³ Sayuti, "Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)."

¹⁴ Aena, "Problem Dan Tantangan Pengembangan Kurikulum Ma'had Aly Di Indonesia"; Amiruddin, "Ma' Had Aly Sebagai Solusi Dalam Mempertahankan Kualitas Pendidikan"; Haris and Nurfaika, "Progresivitas Alumni Ma'had Aly As'adiyah Sengkang Dalam Memperkuat Pendidikan Moderasi Islam."

¹⁵ Lusdiandari, Muhammad, and Yusrain, "Profesionalisme Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kecamatan Sambas."

Islam lainnya. Selain memiliki kapasitas akademik di bidang keagamaan, lulusan Ma'had Aly juga menunjukkan kemampuan komunikasi dan sosial yang baik. Kedekatan mereka dengan masyarakat sekitar, karena sebagian besar pesantren berlokasi di tengah lingkungan sosial, membentuk karakter yang adaptif dan komunikatif. Dari sisi linguistik, banyak di antara mereka yang menguasai bahasa daerah setempat, sehingga mampu berinteraksi efektif dan membangun hubungan sosial yang harmonis dengan masyarakat.

Setiap kebijakan perlu disusun dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan utama. Keterlibatan aktif mereka dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan mendorong terciptanya iklim yang inklusif, responsif terhadap kondisi lokal, serta membantu mengelola potensi konflik kepentingan melalui komunikasi yang efektif¹⁶. Karena itu, proses penyusunan kebijakan harus mencakup identifikasi dan analisis terhadap kepentingan serta pengaruh para stakeholder utama. Mengabaikan pihak-pihak kunci dapat menghambat pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan afirmasi terhadap lulusan Ma'had Aly melalui pemberian nilai tambah dalam seleksi penyuluh agama Islam melibatkan dua pemangku kepentingan utama, yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Perbedaan pandangan antara kedua pihak ini berpotensi menghambat implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan satu pemangku kepentingan pendukung yang juga berperan penting, yakni Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Kepentingan utama Setjen Kemenag terletak pada upaya pencapaian target sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain berfungsi sebagai pihak pendukung, Setjen Kemenag juga berperan sebagai jembatan politis yang memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara kedua direktorat jenderal tersebut.

Peran sebagai jembatan politis pada dasarnya dapat dijalankan secara optimal oleh Menteri Agama. Kepentingan yang diemban Menteri Agama sejalan dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, yakni mendukung pencapaian target sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenag. Bahkan, legitimasi kepentingan tersebut lebih kuat di tangan Menteri Agama, mengingat dokumen Renstra secara formal disahkan melalui penandatanganan oleh Menteri. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2025, pimpinan

¹⁶ Jaenudin, "Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengambilan Keputusan Manajemen Sekolah: Perspektif Pendidikan"; Sinuraya, Yusri, and Muchid, "Kepentingan Stakeholder Dalam Perumusan Kebijakan (Studi Kasus Perda Rt Rw Provinsi Riau No 10 Tahun 2018)."

kementerian/lembaga (dalam hal ini Menteri Agama) memiliki tanggung jawab langsung terhadap pencapaian kinerja sesuai Renstra, termasuk penyampaian laporan evaluasi kepada Presiden.

Sebagai pimpinan tertinggi dalam struktur kementerian, Menteri memiliki kewenangan untuk merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Kewenangan tersebut mencakup pengelolaan barang milik negara serta pengawasan atas pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh unit-unit di bawahnya, terutama direktorat jenderal sebagai pelaksana utama kebijakan. Berdasarkan hierarki organisasi, posisi Menteri berada di atas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal, dengan otoritas penuh terhadap Direktorat Jenderal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dengan demikian, pembahasan mengenai kebijakan afirmasi bagi lulusan Ma'had Aly akan lebih efektif apabila diinisiasi langsung oleh Menteri.

Dari analisis peraturan perundang-undangan terkait, terlihat bahwa legitimasi kebijakan publik secara inheren dipengaruhi oleh dinamika politik. Presiden, sebagai pemegang jabatan eksekutif tertinggi yang diperoleh melalui proses elektoral yang kompleks, berwenang menunjuk menteri untuk mendukung agenda pemerintahannya, sehingga mencerminkan preferensi politik kepemimpinan nasional. Menteri, dengan otoritas hierarkisnya, turut mengarahkan Direktur Jenderal (Dirjen) dalam penyusunan kebijakan teknis. Pada praktiknya, rantai koordinasi ini membentuk struktur vertikal yang berkelanjutan hingga tingkat pimpinan operasional terendah, memungkinkan penetrasi pengaruh politik ke dalam implementasi kebijakan pendidikan secara menyeluruh.

Kebijakan afirmasi yang ditujukan bagi lulusan Ma'had Aly berpotensi tidak mendapat akomodasi dari pemegang jabatan politik apabila tidak selaras dengan kepentingan mereka. Oleh karena itu, pejabat fungsional sebagai analis kebijakan diperlukan untuk melakukan advokasi secara strategis, sehingga rekomendasi tersebut tampak koheren dengan agenda politik pejabat terkait. Pendekatan ini dapat diimplementasikan melalui penyampaian tersirat rekomendasi kebijakan dalam forum rapat evaluasi triwulanan yang rutin dilaksanakan, serta melibatkan kelompok kerja analis kebijakan Kementerian Agama melalui komunikasi informal dan persuasif.

KESIMPULAN

Kementerian Agama menargetkan agar lulusan perguruan tinggi keagamaan Islam dan Ma'had Aly memperoleh pekerjaan dalam kurun waktu kurang dari satu tahun setelah kelulusan, sebagaimana tercantum dalam draft Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama tahun 2025–2029. Target ini meniscayakan adanya seperangkat kebijakan yang saling mendukung dan terintegrasi antardirektorat jenderal. Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah penguatan koordinasi antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam). Ditjen Pendis memiliki kewenangan dalam pengelolaan perguruan tinggi keagamaan Islam dan Ma'had Aly, sementara Ditjen Bimas Islam bertanggung jawab terhadap manajemen penyuluh agama Islam. Mengingat tingginya kebutuhan akan tenaga penyuluh agama yang berkualitas, pemenuhannya tidak dapat dilakukan secara serampangan dengan mengabaikan kompetensi akademik dan profesional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif yang memberikan kemudahan bagi lulusan Ma'had Aly untuk berperan sebagai penyuluh agama Islam. Kebijakan semacam ini bersifat strategis karena memberikan keuntungan timbal balik bagi kedua direktorat jenderal: Ditjen Bimas Islam memperoleh penyuluh agama yang kompeten dalam bidang ilmu keagamaan, sementara Ditjen Pendis memperoleh dampak positif berupa peningkatan reputasi Ma'had Aly di masyarakat. Secara lebih luas, Kementerian Agama juga akan diuntungkan dengan tercapainya target strategis “lulusan satu tahun langsung kerja” secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, M Sayyidul, dan Moh. Solikul Hadi, “Integral Values in Madrasah: to Foster Community Trust in Education,” *Istawa : Jurnal Pendidikan Islam*, 5.2 (2020), 160 <<https://doi.org/10.24269/ijpi.v5i2.2736>>
- Aena, Nur. “Problem Dan Tantangan Pengembangan Kurikulum Ma'had Aly Di Indonesia.” *Bestari* 18, no. 2 (2021): 197. <https://doi.org/10.36667/bestari.v18i2.949>.
- Amiruddin, Marzuki dan. “Ma ' Had Aly Sebagai Solusi Dalam Mempertahankan Kualitas Pendidikan.” *Jurnal Al-Fikrah* 9, no. 2 (2020): 168–81.
- Firmansyah, Asep. “Kemenag Usulkan 71 Ribu Formasi Penyuluh Agama Islam Ke Kemenpan RB.” *Antara*, 2025. <https://www.antaraneews.com/berita/5061353/kemenag-usulkan-71-ribu-formasi-penyuluh-agama-islam-ke-kemenpan-rb>.

- Hadi, Moh. Solikul, "Implementasi Model Pengembangan Multiple Intellegence Dalam Meningkatkan Kecerdasan Natural Peserta Didik Melalui Metode Project Based Learning Di Kelas X Manpk Yogyakarta Pada Mata Pelajaran Fikih," 2018, 152 <<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33289/>>
- Hadi, Moh. Solikul, M. Sayyidul Abrori, dan Dwi Noviatul Zahra, "Pengembangan Multimedia Interaktif Macromedia Flash Profesional 8 Pada Pembelajaran Al-Qur'an Hadis Kelas X Semester Genap Di Man 1 Yogyakarta," *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 3.2 (2020), 148 <<https://doi.org/10.24127/att.v3i2.1123>>
- Hadi, Moh Solikul, Abdul Kahfi Amrullah, dan Khoerul Anwar, "Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies Membentuk Peserta Didik Menjadi Pribadi Ulul al-bab Prespektif," 1.1 (2024), 61–62
- Haris, Abd., and Nurfaika. "Progresivitas Alumni Ma'had Aly As'adiyah Sengkang Dalam Memperkuat Pendidikan Moderasi Islam." *Innovations in Multidisciplinary Education Journal* 1, no. 1 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.61476/rzkycn67>.
- Jaenudin, Jaenudin. "Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengambilan Keputusan Manajemen Sekolah: Perspektif Pendidikan." *Journal of Education Research* 5, no. 1 (2024): 939–44. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i1.937>.
- Kadiyono, Anissa Lestari, and Rezki Ashriyana Sulistiobudi. "Peningkatan Graduate Employability Melalui Career Development Training Pada Mahasiswa." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 12 (2018): 999–1002.
- Kementerian Agama. "Enam Ma'had Aly Terima Ijop, Total 91 Lembaga Sudah Kantongi Izin," 2025. <https://kemenag.go.id/nasional/enam-ma-had-aly-terima-ijop-total-91-lembaga-sudah-kantongi-izin-5G2YB>.
- . "Kemenag Terbitkan PMA 11/2025, Jadi Pedoman Hitung Kebutuhan Penyuluh Agama," 2025. [https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-terbitkan-pma-11-2025-jadi-pedoman-hitung-kebutuhan-penyuluh-agama-H9sTW\)%5B2](https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-terbitkan-pma-11-2025-jadi-pedoman-hitung-kebutuhan-penyuluh-agama-H9sTW)%5B2).
- Kementerian Agama, and Muhammad Marjan Madyansyah. "Lulusan Ma'had Aly Berpeluang Ikut Seleksi CPNS," 2024. <https://kemenag.go.id/nasional/lulusan-ma-had-aly-berpeluang-ikut-seleksi-cpns-CExNI>.
- Kurnia, Adi. "Telaah Proses Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dalam Perspektif Manajemen Strategis (Penelitian Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya)." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 7, no. 2 (2020): 268–76. <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/3607>.
- Lusdiandari, Witri, Rifqi Muhammad, and Yusrain. "Profesionalisme Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kecamatan Sambas." *Syi'ar: Jurnal Ilmu Komunikasi, Penyuluhan Dan Bimbingan Masyarakat Islam* 7, no. 1 (2024): 1–9. <https://doi.org/10.37567/syiar.v7i1.2328>.
- Maskuri, Maskuri. "Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Agama Nomor 32

- Tahun 2020 Tentang Ma'Had Aly: Antara Harapan Dan Dilema." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 18, no. 1 (2023): 148–64. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v18i1.148-164>.
- Moh. Solikul Hadi, Muhammad Nuril Anam, M. Sayyidul Abrori, "Reconstruction Of Martin Heidegger's Thinking Existentialism Model on Education inThe Industrial Era 4.0," *Journal of Research in Islamic Education*, 03.02 (2021), 47–58
- Pramesti, Kansha Dianita, Nur Indah Meisya, and Rizki Amrillah. "Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi Dengan Dunia Kerja." *An Najah Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan* 3, no. 4 (2024): 236–43. <https://journal.nabest.id/index.php/annajah>.
- Sapruddin, Sulfakri. "Rencana Strategis Kementerian Agama 2025 2029," 2025. <https://www.scribd.com/document/885685363/Rencana-Strategis-Kementerian-Agama-2025-2029>.
- Satu Data Kementerian Agama. "Jumlah Santri Ma Had Aly Menurut Jenis Kelamin," 2022. <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-santri-ma-had-aly-menurut-jenis-kelamin>.
- Sayuti, Hendri. "Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)." *Menara Riau: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Pengembangan Masyarakat Islam* 12, no. 1 (2013): 41–47.
- Setiawan, Verda Nano. "Serikat Buruh Ungkap 126.160 Pekerja Kena PHK per Oktober 2025," 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20251108133216-4-683454/serikat-buruh-ungkap-126160-pekerja-kena-phk-per-oktober-2025>.
- Sinuraya, Syahri Ramadhani, Ali Yusri, and Muchid. "Kepentingan Stakeholder Dalam Perumusan Kebijakan (Studi Kasus Perda Rt Rw Provinsi Riau No 10 Tahun 2018)." *Journal on Education* 05, no. 01 (2022): 1372–80. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/910>.
- Trikarinaputri, Ervana, Vindry Florentin, and Han Revanda. "Rangkaian Gelombang PHK Sejak Awal 2025: Media Massa Hingga Sektor Manufaktur," 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/rangkaian-gelombang-phk-sejak-awal-2025-media-massa-hingga-sektor-manufaktur-1374251>.
- Wahyono, Imam. "Strategi Manajemen Pengembangan Kompetensi Daya Saing Lulusan Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo." UIN KHAS Jember, 2024.
- Wahyuni, Sri, M Shahid Anggi E R, and Iwan Aprianto. "Implementasi Strategi Dan Kebijakan Pendidikan Islam." *Socius: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 20 (2025).
- Yusmei, Nining, and Iswantir. "Kontribusi Ma'had Aly Terhadap Pemahaman Keislaman Melalui Pendidikan Agama Islam Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* 1, no. 2 (2022): 117–26. <https://jpion.org/index.php/jpi117Situswebjurnal>:<https://jpion.org/index.php/jpi>.